



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA SUKARAME BARU KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Sani Susanti¹, Putri Sari²

Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Medan, Deli Serdang, Indonesia

sanisusanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan permasalahan peran pemerintah desa dalam pembinaan, pelayanan dan pengembangan pada kelompok tani desa Sukarame Baru Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembinaan, pelayanan dan pengembangan pada kelompok tani desa Sukarame. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 88 orang. Pengambilan sampel menggunakan tehnik random sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani dengan indikator pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan program-program dan pembinaan secara keseluruhan berada pada skor rata-rata 295 dengan kriteria yang tergolong tinggi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Gambaran peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani menunjukkan bahwa kelompok tani desa Sukarame Baru adalah sebuah kelompok yang dapat dibergunakan dalam memajukan masyarakat desa Sukarame Baru serta adanya peran dari pemerintah desa sehingga mampu memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan dalam membina, mengembangkan dan melayani kelompok tani.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Kelompok Tani, Masyarakat

Abstract

This research is motivated by the problem of the role of the village government in fostering, servicing and developing farmer groups in Sukarame Baru village, Kualuh Hulu district, Labuhan Batu Utara district. The type of research used is descriptive with a quantitative approach. The sample in this study revealed as many as 88 people. Sampling using random sampling technique. Data collection tools used were questionnaires, interviews and field observations. The results showed that the variable of the role of the village government in empowering farmer groups with indicators of program implementation and overall development was at an average score of 295 with high criteria. The conclusion in this study is that the description of the role of the village government in empowering farmer groups shows that the Sukarame Baru village farmer group is a group that can be used in advancing the Sukarame Baru village community and the role of the village government so that it is able to facilitate whatever is needed in fostering, developing and serving farmer groups.

Keywords: Village Government, Farmer Group, Community

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah bidang pertanian merupakan salah satu bidang keamanan pangan yang disebut dengan

“pertanian dan ketahanan pangan”. Pertanian merupakan sektor yang beroperasi secara otonom di tingkat daerah. Oleh karena itu, sektor pertanian (ketahanan pangan)

merupakan instansi pemerintah, dan kewenangannya juga diawasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah/kota. Desentralisasi memiliki tanggung jawab yang besar kepada pemerintah daerah, oleh karena itu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pertaniannya menjadi isu yang penting. Memberdayakan masyarakat adalah proses pembangunan, dan masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri.

Pemerintah Desa merupakan struktur Pemerintahan paling bawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakatnya, sehingga kewenangan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kepala desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Kelompok tani merupakan media penyuluhan pertanian, tempat kegiatan produksi pertanian atau sebagai unit produksi, dimana penyuluh berperan sebagai pengawas, dan petani sebagai pelaksana proses produksi pertanian. Organisasi pertanian yang beranggotakan kelompok tani sebagai badan utamanya memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian dan merupakan pemimpin dalam pembangunan pertanian. Didusun Sukarame baru terdapat 5 kelompok tani yaitu: kelompok tani Sido Makmur 31 orang, kelompok tani Kita Maju 21 orang, kelompok tani Sumber Sari 21 orang, kelompok tani Melati Jaya 16 orang, dan kelompok tani Tunas Muda 24 orang. Adapun kegiatan yang dilakukan didalam kelompok tani tersebut secara garis besar adalah pengajuan bantuan pupuk, bantuan bibit kelapa sawit, palawija dan bibit ikan dan ternak sapi, bantuan racun untuk tanaman, subsidi pupuk, dan koperasi (simpan pinjam). Keadaan masing-masing setiap kelompok tani di desa Sukarame Baru mengalami keberhentian kegiatan dilapangan ataupun disetiap kegiatannya

selama masa pandemi Covid-19 saat ini.

Dikarenakan dari pemerintah dilarang melakukan kegiatan yang memicu keramaian, karena kegiatan rutin yang biasanya dilakukan sebelum masa pandemin covid-19 adalah kegiatan silaturahmi antara anggota untuk menjalin keakraban antar anggota. Dan saat ini pemerintah desa juga tidak ada mengadakan atau memberikan program kepada kelompok tani selama masa pandemi covid-19.

Namun sayangnya sektor pertanian yang dikelolah oleh kelompok tani mengenai pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok tani oleh pemerintah desa Sukarame Baru Kecamatan Kualuh Hulu kurang berjalan secara maksimal selama sama pandemi covid-19. Permasalahan yang terjadi dapat merugikan kehidupan warga desa dan kelompok masyarakat lainnya khususnya kelompok tani. Dapat dikatakan bahwa saat terjadi pandemi rencana kelompok tani di Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualauh Hulu kurang berjalan dengan baik, karena pada saat pandemi banyak kegiatan yang dihentikan oleh pemerintah desa, sehingga kegiatan kelompok dilakukan oleh petani masih menunggu instruksi dan persetujuan dari pemerintah desa. Apabila dilihat dari sumber potensi-potensi yang ada di desa tersebut, seharusnya pemerintah desa Sukarame Baru mampu untuk memberdayakan masyarakat melalui kelompok tani dengan berbagai kegiatan yang harusnya dilakukan didalam kelompok tersebut lalu direalisasikan kepada masyarakat.

Adapun Peran dari Pemerintah Desa menurut Ita Ulumiyah (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.5, Hal.893) dalam memberdayakan masyarakat sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan

Di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. Berusaha mencapai tujuan dan sasaran pembangunan,

menetapkan gagasan pokok, dan berupaya memberdayakan masyarakat agar masyarakat lebih maju, sejahtera, dan mandiri. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa dengan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) berupa penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan. kebijakan yang dapat dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Mengaktifkan kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia (SDM).
- Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Program-Program

Pemerintah Desa Sebelum membuat Program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, Kemudian dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, LPMD, BPD serta Pemerintah Desa. Peran pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat pada poin pertama yaitu menekankan pendekatan dari bawah (bottom up approach). Dengan adanya pendekatan dari bawah maka Pemerintah Desa bisa membuka kesempatan kepada masyarakat desa untuk terlibat dalam menggali gagasan sehingga program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi hasil kegiatanyang ada dilapangan.

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembina

Kepala Desa mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat desa mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan petani merupakan tujuan utama pembangunan pertanian saat ini dan di masa depan. Pemberdayaan petani akan menyebabkan petani lepas dari kemandirian pertanian. Petani mandiri dapat dibudidayakan dan dikembangkan melalui kegiatan kelompok. Fungsi kelompok antara lain sebagai wadah pembelajaran, alat koperasi dan unit produksi pertanian. Menurut definisi Kementerian Pertanian, kelompok tani adalah kelompok tani/petani yang terdiri dari petani dewasa (laki-laki atau perempuan) dan petani peserta pelatihan (pemuda dan perempuan) yang didasarkan pada pemimpin yang bersentuhan satu sama lain.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kuantitatif. Dengan demikian metode penelitian dalam proposal penelitian ini yaitu bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kelompok tani mengenai "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sukarame Baru Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara".

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 bulan yang dilakukan mulai dari tgl 08 april sampai 08 juni. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan dengan kelompok tani dan perangkat desa Sukarame Baru dengan item-item pertanyaan untuk penggalian informasi mengenai identitas sosial para subjek penelitian yang berjumlah 13 anggota kelompok tani. Teknik penghitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling yaitu mengambil secara

acak presentase dengan jumlah sampel 88 orang dari anggota kelompok tani.

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Seangan tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel distribusi frekuensi dan tabel kriteria kecenderungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa ketiga indikator yaitu pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan program-program dan pembinaan memiliki kategori tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok tani desa sukarama baru dapat dikatakan dapat berjalan dengan baik sehingga peran dari pemerintah desa juga sudah sangat berpengaruh terhadap kelompok tani melalui program-program yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap para kelompok tani atau petani. Keadaan ini terlihat dari bagaimana kelompok tani dalam memajukan pertanian atau perternakan di desa Sukarama Baru. Khususnya dalam mengolah dan mengembangkan serta meningkatkan hasil pertanian masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Sukarama Baru. Hal ini dilihat dari partisipasi mereka dalam mengikuti berbagai kegiatan dan program-program yang diberikan oleh pemerintah desa dalam memajukan kelompok tani di desa Sukarama Baru. Buktinya terlihat pada hasil rata-rata skor ketiga indikator yaitu skor rata-rata sebesar 295 yang tergolong pada kategori tinggi.

Pada indikator pelaksanaan kebijakan kelompok tani yang ada di Desa Sukarama Baru Kecamatan Kualuh Hulu dijelaskan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa skor rata-rata sebesar 292 atau daam kategori tinggi pelaksanaan kebijakan di kelompok tani masih sangat dipatuhi dan ditaati oleh setiap anggota kelompok tani kepada pengurus kelompok tani ataupun kelompok tani terhadap pemerintah desa dalam mengupayakan ketertiban dalam memajukan kolompok tani di desa sukarama Baru Kecamatan Kualuh Hulu Dalam indikator ini juga terlihat bagaimana cara setiap kelompok

tani dalam memanagemen suatu kelompok dalam memajukan kelompok tani.

Tabel 1
kecenderungan pelaksana kebijakan

Interval	Kriteria	Frekuensi	Presentase
$X < 277$	Sangat Rendah	1	9%
$278 < X \leq 287$	Rendah	2	18%
$288 < X \leq 297$	Sedang	3	27%
$298 < x \leq 307$	Tinggi	5	45%
$X > 307$	Sangat Tinggi	0	0%
Total		11	100%

Dari hasil tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator pelaksanaan kebijakan termasuk dalam kategori tinggi dengan karena memiliki jumlah sebanyak 5 frekuensi atau 45%.

Pada indikator pelaksanaan program-program, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa skor rata-rata sebesar 295 dengan kategori yang tergolong tinggi. program-program yang dilakukan oleh kelompok tani dapat terealisasikan dengan baik dan dapat tersampaikan serta diterima baik oleh masyarakat. Adapun program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelompok tani adalah pembagian pupuk bersubsidi, pembagian pohon buah buahan, pohon aren, kelapa sawit dan lain-lain, serta adanya sspenyuluhan dalam penanaman guna meningkatkan hasil pertanian, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan indikator pelaksanaan program-program masih berada pada kecenderungan tinggi pada kelompok tani desa Sukarama Baru Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Tabel 2
Kecenderungan Pelaksanaa Program

Interval	Kriteria	Frekuensi	Presentase
$X < 259$	Sangat Rendah	2	20%
$260 < X \leq 281$	Rendah	0	0%
$282 < X \leq 302$	Sedang	4	40%
$303 < x \leq 324$	Tinggi	5	50%
$X > 324$	Sangat Tinggi	0	0%
Total		10	100%

Dari hasil tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator pelaksanaan program-program termasuk dalam kategori tinggi karena memiliki jumlah 5 frekuensi atau 50%.

Namun disisi lain, indikator pembinaan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa skor rata-rata sebesar 297 dengan kategori yang tergolong tinggi. Indikator pembinaan juga berperan amat sangat penting karena di desa sukarama baru selalu mengadakan pertemuan juga menjalin silaturahmi antar kelompok tani. Pertemuan yang dilakukan juga digunakan sebagai tempat untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan atau rencana yang akan dilakukan kedepannya, serta dengan adanya pertemuan yang dilakukan setiap bulannya dapat menjadi sarana dalam membina kelompok tani agar lebih maju dan meningkatkan hasil pertanian. Tidak hanya kelompok tani saja yang melakukan pembinaan, tetapi pemerintah desa juga malakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kelompok tani selama 3 bulan sekali dalam memantau peningkatan kualitas dari kelompok tani tersebut serta memberikan arahan dan pembinaan terhadap kelompok tani.

Tabel 3
Kecenderungan Pembinaan

Interval	Kriteria	Frekuensi	Presentase
$X < 279$	Sangat Rendah	0	0%
$280 < X \leq 291$	Rendah	3	33%
$292 < X \leq 303$	Sedang	2	22%
$304 < x \leq 314$	Tinggi	4	44%
$X > 314$	Sangat Tinggi	0	0%
Total		9	100%

Dari hasil tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator pelaksanaan program-program termasuk dalam kategori tinggi karena memiliki jumlah 4 frekuensi atau 44%.

Secara teoritis, kelompok tani diartikan sebagai kumpulan petani yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kepentingan bersama dalam usahatani., 8) dan program-program Adapun program-program bantuan pemerintah terhadap kelompok tani seperti: 1) penyaluran pupuk bersubsidi, 2) penyuluhan teknologi pertanian, 3) kredit usahatani ber-subsidi, 4) pembagian bibit (buah-buhan dan palawija), 5) simpan pinjam (koperasi) antar anggota kelompok tani, 6) menjalin silaturahmi antar anggota kelompok tani, 7) ada penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa dala menabahnya wawasan dalam bidang pertanianlain disalurkan melalui kelompok tani Oleh karena itu, petani yang ingin mendapat fasilitas bantuan program pemerintah harus menjadi anggota kelompok.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Adapun program-program bantuan pemerintah terhadap kelompok tani seperti: 1) penyaluran pupuk bersubsidi, 2) penyuluhan teknologi pertanian, 3) kredit usahatani ber-subsidi, 4) pembagian bibit (buah-buhan dan palawija), 5) simpan pinjam (koperasi) antar anggota kelompok tani, 6) menjalin silaturahmi antar anggota kelompok tani, 7) ada penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa dala menabahnya wawasan dalam bidang pertanian.

Gambaran peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani menunjukkan bahwa kelompok tani desa Sukarame Baru adalah sebuah kelompok yang dapat dibergunakan dalam memajukan masyarakat desa Sukarame Baru serta adanya peran dari pemerintah desa sehingga mampu memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan dalam membina, mengembangkan dan melayani kelompok tani. Dengan hasil pengolahan data berada pada skor rata-rata 295 (tinggi).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Almutahar, H. 2013. *Pembangunan Masyarakat*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chozin, Dkk. 2013. *Pembangunan Pedesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB Press.
- Djemari, Merapi. 2008. *Tehnik Penyusunan Instrumen Tes Dan Nontes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Irwan, M., Rosdiana, R., & Kurniawan, F. (2020). Pendampingan ibu rumah tangga (IRT) dalam inovasi produk limbah lidi kelapa sawit sebagai penghasil tambahan pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Education For All: Media Informasi Ilmiah Bidang Pendidikan Luar Sekolah*, 2(2), 91-96.
- Kiswanto. 2018. *Menggerakkan Kelompok Tani Mandiri*. Yogyakarta: Rubrik.
- Kusnadi, Agus. 2015. *Perkembangan Polik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Padjajaran Journal Of Law. <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9457>. Diakses pada 01 Februari 2021 pukul 15:45 Wib.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebianto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Oroh, Gleydis. 2015. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Politico*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/6723>. Diakses pada 01 Februari 2021 pukul 15:50 WIB.
- Rahardjo. 2014. *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rumlus, dkk. 2017. *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan Di Desa Trikora Kecamatan kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat*. *Jurnal eksekutif*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16191>. Diakses pada 30 januari 2021 pukul 09:09 WIB.
- Sugiman. 2018. *Pemerintah Desa*. *Jurnal Binamulia Hukum*. <http://fh-ungris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/16>. Diakses pada 15 maret 2021 pukul 20:00 WIB.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Susanti, S., Irwan, M., Nainggolan, E., & Zati, V. D. A. (2019, December). Empowerment of Marginal Women Through the Use of Banana Skin Waste in The Women's Life Skill Program. In *Proceeding International Conference of Science Education in Industrial Revolution 4.0* (pp. 115-120).
- Rustriningsih, R., Mutiara, S. S., Ulya, T. F., & Redjosari, S. M. (2023). *Pemberdayaan*

- Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi di Dusun Kaloang Desa Lerang Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(2), 82-88.
- Sutanta. 2019. Belajar Mudah Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Thema Publishing.
- Theresia, dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung : Alfabeta
- Usman, Sunyoto. 2012. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Hak Kepala Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Wiskandar, W., & Zurhalena, Z. (2023). Pemberdayaan Kelompok Tani Makmur Melalui Pembuatan Biochar Limbah Kelapa Sawit Areal Replanting untuk Meningkatkan Kesuburan Tanah. *Lumbung Ngabdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 19-24.
- Yasa, T. n. 2019. Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Dalam Pemberdayaan Petani Di Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (SKRIPSI). Medan: Program Pengembangan Masyarakat Islam.
- Yuliana & Deiby. 2018. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Laba Besar, Kecamatan Loloda Selatan). <https://osf.io/tx9pv>. Diakses Pada 10 Januari 2021 Pukul 21:09 WIB.
- Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik. Jakarta: Kenca